



PU Fraksi DPRD Terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2012

Banyak Saran Buat Walikota

Rudi
Borneo Tribune, Singkawang

adanya temuan BPK RI berupa ketidakpatuhan Pemerintah Kota Singkawang terhadap Peraturan Perundang-Undangan antaralain, satu, terdapat penggunaan langsun atas penerapanan Pandangan Umum (PDU) terhadap Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Pemkot Singkawang Tahun Anggaran 2012 yang sebenarnya sudah disampaikan Walikota Awang Ishak, Selasa (13/8) kemarin, di ruang Sidang Utama DPRD Kota Singkawang.

PU Fraksi Partai Demokrat, Tavip Putra Prubaha, dalam pidata menyampaikan, menemati pidato pengantar yang sudah disampaikan Walikota pada Sidang Paripurna kemarin, dari fraksi kami, kata Tavip, dapat menarik beberapa kesimpulan, pertama, Pemkot Singkawang relatif mampu mendapatkan kucuran atau bantuan dana dari bantuan negara namun belum maksimal mengambil dana dari halaman sendiri. Hal ini dapat tergambar melalui target PAD yang dianggarkan namun terrealisasi hanya 37.321.449.060 atau hanya 85,27%. Sementara dana perimbangan yang semula ditargetkan 432.001.017.905 namun dapat terealisasi setercapai 1.01.01% Kedua, Pemkot Singkawang mampu menyeusun program dan rencanaan naman belum berhasil secara maksimal melaksanakan program tersebut sehingga menghasilkan slipa sebesar Rp 42 miliar lebih. Dan ketiga, LHP kita belum naik kelas, masih berkutu pada WDP. "Penyekit menahan Pemkot sebenarnya sudah terdeteksi namun belum mengalami peningkatan segera total," ujar Tavip.

PU Fraksi Indonesia Baru, Julwin, dalam pidatonya menyampaikan, melihat slipa APBD TA 2012 sebesar Rp 42.859 miliar. Hal ini merupakan dalam membangun program sehingga banyak program yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Untuk itu Fraksi Indonesia Baru meminta kepada Walikota Singkawang untuk memerintahkan SKPD-

permasalahan yang disampaikan, lanjut Dedi, bahwa tidak tercapainya tarif PAD disebabkan oleh berapa hal antara lain, masih menjadi dasar hukum yang menjadikannya Peraturan Daerah. Kelebihan melihat besarnya potensi Pendapatan Daerah di kota ini, kami minta kepada Walikota agar lebih dapat memenuhi dan memenangkan SKPD untuk meningkatkan sistem perencanaan, pengawasan, manajemen dan penerapan sanksi serta keputusan wajib pajak dan retribusi daerah yang belum maksimal.

untuk itu Fraksi Golkar meminta agar segera dilakukan penyempurnaan peraturan daerah khususnya yang mengatur mengenai tarif pajak, memaksimalkan sarana dan prasarana yang ada, meningkatkan kualitas SDM aparatur pengelola PAD dan lembaga menegakkan sistem perencanaan serta menerapkan sanksi sesuai ketentuan yang perlakuan bagi aparat maupun wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya.

Fraksi Gerindra dan Hanura, Rozanddin menyampaikan, setelah mendengar kritikus mengkritik pelaksanaan Raperda tersebut agar dihadirkan Dir. as Pendidikan dan tution sehingga dapat memberikan keterangan terhadap program tersebut," pinta Teo.

Untuk Dinas Kelautan, lanjut Teo, mengenai program budidaya perikanan, kami menemukan program tersebut tidak sesuai dengan azas pemanfaatan. Karenanya masih sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan bahkan bisa lebih dari target yang ditetapkan apabila sektor-sektor yang dapat dijadikan sumber PAD dapat benar-benar dioptimalkan pengelolaannya. Sama halnya dengan retribusi daerah yang semula ditargetkan sebesar Rp 42.097.971.145,48, hal ini terdapat perbedaan dengan realisasi pendapatan dalam LHP-BPK RI realisasi pendapatan tahun 2012 sebesar Rp 43.770.773.556,18 terrealisasi sebesar Rp 37.321.499.060,04 atau mencapai 85,27% mengindikasikan bahwa sebenarnya masih sangat dimungkinkan untuk ditingkatkan bahkan bisa lebih dari target yang ditetapkan.

BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang TA 2012," sarananya. PU Fraksi Partai Golkar, Dedi Mulyadi menyampaikan, berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK, selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Kedua, seperti kita ketahui bersama bahwa LHP BPK RI terhadap laporan keuangan Pemkot Singkawang TA 2012, memperintahkan Sekretaris Daerah untuk memberikan sanksi sesuai ketentuan kepada Kepala Politeknik yang berlaku. Kedua, merintahkan kepada Kepala Politeknik yang belum memberikan peringatan kepada Partai Politik yang belum menyampaikan surat pertanggungjawaban dengan disertai batas waktu akhir perumpamaan. Ketiga, memerintahkan terdapat laporan keuangan yang semula ditargetkan 432.001.017.905 namun dapat terealisasi setercapai 1.01.01%. Kedua, Pemkot Singkawang mampu menyeusun program dan rencanaan naman belum berhasil secara maksimal melaksanakan program tersebut sehingga menghasilkan slipa sebesar Rp 42 miliar lebih. Dan ketiga, LHP kita belum naik kelas, masih berkutu pada WDP. "Penyekit menahan Pemkot sebenarnya sudah terdeteksi namun belum mengalami peningkatan segera total," ujar Tavip.

PU Fraksi Indonesia Baru, Julwin, dalam pidatonya menyampaikan, melihat slipa APBD TA 2012 sebesar Rp 42.859 miliar. Hal ini merupakan dalam membangun program sehingga banyak program yang tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. "Untuk itu Fraksi Indonesia Baru meminta kepada Walikota Singkawang untuk memerintahkan SKPD-

sertifikasi guru yang sampai saat ini belum terwujud kedua, yakni bulan April-Juni dan Juli-September masih belum dibayarkan kepada yang berhak meneminnnya. Dan meminta kepada Walikota untuk segera mendefinisikan para kepala SKPD yang masih bersatus Plt, mengingat beban kerja dan tanggung jawab tidak berimbang dengan hak-hak yang seharusnya mereka terima sehingga nantinya dapat berdampak pada kinerjanya. Sementara itu, PU Fraksi PDI Perjuangan, Teo Tifilus Nungkut meminta kepada Walikota agar segera dapat memindaklanjuti hasil audit PDI Perjuangan. Teo juga meminta kepada Walikota untuk memerintahkan kepada Kepala-Kepala SKPD untuk segera merealisasikan APBD 2013 yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa agar segera diterdakkan. Khusus di beberapa Kelurahan, misalnya di Singkawang Timur, kata Teo, fraksi kami melihat prasaranan mati total. Padahal arus lalu lintas semakin padat apalagi pada malam hari menjadi rawan kecelakaan. Untuk itu kepada instansi terkait segera menangani permasalahan tersebut.

Fraksi PDIP sanggup mendukung riat baik Walikota dalam menanggulangi krisis air bersih di Kota Singkawang, untuk itu kami meminta agar tetap selalu melakukan koordinasi dengan Legislatif sesuai dengan study kelaruan dan tahapan-tahapan yang akan diutentukan, sehingga tetap terkontrol dan sesuai dengan manfaat bagi masyarakat Kota Singkawang.

Dan terakhir, Fraksi PDI-P meminta agar Walikota segera menyurat Kepala PLN Singkawang untuk mengesiger tiang listrik di Jalan Awang Duta, Kelurahan Setapuk Besar dan Semetap Kecil.

Kemudian, Teo meminta penjelasan kepada Walikota tentang beban kerja dan